

Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) Di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Ratih Jefia¹, Yuliarti^{2*}

^{1,2} Universitas Negeri Padang

Abstrak: Dalam Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) telah diterapkan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi dari kebijakan MBKM ini. Penelitian ini dilakukan dengan metode campuran (*mix methods*), yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif melalui survei bersama dengan wawancara sebagai alat penggalian data. Informan dalam penelitian ini berasal dari dosen Fakultas Ilmu Sosial, unsur pimpinan Fakultas Ilmu Sosial, pihak MBKM Universitas Negeri Padang, dan mahasiswa yang mengikuti program MBKM di Fakultas Ilmu Sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya dalam pelaksanaan program MBKM di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang secara umum sudah berjalan dengan baik. Namun, masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan seperti proses pengkonversian nilai, pencairan dana yang harusnya tepat waktu, dan sosialisasi yang harus dilakukan secara berkala kepada mahasiswa dan dosen terkait program MBKM ini supaya dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa dan dosen terkait pelaksanaan program MBKM di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Kata Kunci: Kebijakan MBKM, Evaluasi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v6i1.175>

*Correspondence: Yuliarti

Email: uly.yuliarti@gmail.com

Received:11-01-2025

Accepted:12-02-2025

Published:01-03-2025



Copyright:©2024bytheauthors.

Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: In the Faculty of Social Sciences, Padang State University, the Independent Learning-Independent Campus (MBKM) policy has been implemented. The aim of this research is to evaluate the MBKM policy. This research was conducted using mixed methods, which combines quantitative and qualitative approaches through surveys together with interviews as a data mining tool. The informants in this research came from lecturers at the Faculty of Social Sciences, elements of the leadership of the Faculty of Social Sciences, MBKM at Padang State University, and students taking part in the MBKM program at the Faculty of Social Sciences. The results of the research show that the implementation of the MBKM program at the Faculty of Social Sciences, Padang State University has generally gone well. However, there are still several things that need to be improved, such as the process of converting grades and socialization which must be carried out periodically to students and lecturers regarding the MBKM program in order to increase students' and lecturers' understanding regarding the implementation of the MBKM program at the Faculty of Social Sciences, Padang State University.

Keywords: MBKM Policy, Evaluation, Faculty of Social Sciences, Padang State University

Pendahuluan

Saat ini, kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah banyak aspek kehidupan, terutama pendidikan tinggi. Dalam era yang sangat dinamis ini, diperlukan transformasi pembelajaran yang memungkinkan lulusan pendidikan tinggi mempersiapkan diri untuk menjadi generasi yang unggul, tanggap, dan sigap untuk menghadapi tantangan sesuai perkembangan zaman. Kreativitas dan inovasi sangat penting untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia, terutama untuk meningkatkan sumber daya manusia (Nirmayanthi et al., 2024; SUGIARTI, 2023; Wasih & Tama, 2023). Kebijakan Merdeka Belajar—Merdeka Kampus (MBKM) di perguruan tinggi adalah salah satu inovasi terbaru (Fauziah & Kuntari, 2023; Khaira, 2023; Shofia et al., 2023).

Merdeka Belajar—Kampus Merdeka (MBKM) adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan tujuan meningkatkan kompetensi dan mengembangkan potensi lulusan perguruan tinggi. Kebijakan ini menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap untuk menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi (Adawiyah et al., 2023; Nurkholidi, 2022). Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 memberikan siswa kesempatan untuk belajar di luar program studi selama tiga semester. Tiga semester ini terdiri dari satu semester belajar di luar program studi dan dua semester melakukan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi. Program Belajar Merdeka – Kampus Merdeka (MBKM) mencakup (1) Pertukaran Mahasiswa dan (2) Praktik Kerja/Magang Profesi, (3) Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, (4) Penelitian Riset, (5) Proyek Kemanusiaan, (6) Kegiatan Wirausaha, (7) Studi/Proyek Independen, dan (8) Proyek/Membangun Desa.

Dalam mendukung program pemerintah sejak dikeluarkannya peraturan tersebut, Universitas Negeri Padang melalui program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) sudah mengirimkan beberapa mahasiswa dalam pertukaran mahasiswa di berbagai universitas di luar Sumatera (Agus & Asiah, 2021; Baharuddin, 2021; Dewanta, 2022). Selain itu, Universitas Negeri Padang juga aktif mengirimkan beberapa mahasiswanya untuk mengikuti program magang bersertifikat di berbagai perusahaan nasional maupun internasional, serta juga aktif dalam mengirimkan mahasiswanya untuk mengikuti program kampus mengajar atau asisten mengajar di berbagai lembaga pendidikan pada tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK di seluruh Indonesia (Majalah UNP Edisi-7, 2022).

Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa mendapatkan banyak manfaat dari program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Negeri Padang setiap tahunnya. Namun, ada banyak pro dan kontra tentang cara program ini dijalankan, terutama di Fakultas Ilmu Sosial. Selain itu, masih ada keluhan dan masalah yang dihadapi oleh mahasiswa yang mengikuti program. Hasil survei awal yang dilakukan terhadap beberapa mahasiswa yang mengikuti program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang menunjukkan bahwa salah satu

keluhan dan masalah yang paling sering dihadapi oleh mahasiswa yang mengikuti program ini adalah kesulitan untuk mengubah nilai mereka karena tidak ada sistem atau peraturan yang jelas, permasalahan rentang waktu pencairan dana yang sangat lama diterima oleh mahasiswa yang mengikuti program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM), masih kurangnya pendampingan dan pengayoman yang dilakukan oleh pihak Universitas terhadap mahasiswa yang mengikuti program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) ini, masih kurang baiknya pelaksanaan prosedur yang dilakukan oleh pihak universitas dalam pelaksanaan program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM), serta lamanya pemberian informasi dan pengurusan surat-menyurat terkait program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) tersebut.

Dengan mempertimbangkan latar belakang masalah di atas, jelas bahwa pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) masih jauh dari sempurna dan bahwa ada beberapa masalah yang perlu diperhatikan. Maka dari itu, perlu dilakukannya evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka ini terkhususnya di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Metode Penelitian

Jenis penelitian campuran (mixed methods) digunakan dalam penelitian ini. Sugiyono menjelaskan dalam (Saparudin & Arizona, 2022) bahwa Penelitian metode campuran adalah metode penelitian yang memadukan dua metode kuantitatif dan kualitatif dalam suatu kegiatan penelitian untuk menghasilkan data objektif yang lebih komprehensif, valid, dan dapat diandalkan. Dalam kasus ini, metode penelitian ini menggabungkan model urutan penemuan analisis kualitatif dan kuantitatif. Oleh karena itu, penulis terlebih dahulu memulai pengumpulan data dengan menggunakan metode kuantitatif sebelum melanjutkan proses penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Alasan mengapa penulis memilih metode ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang hasil kuantitatif yang telah mereka peroleh sebelumnya.

Hasil dan Pembahasan

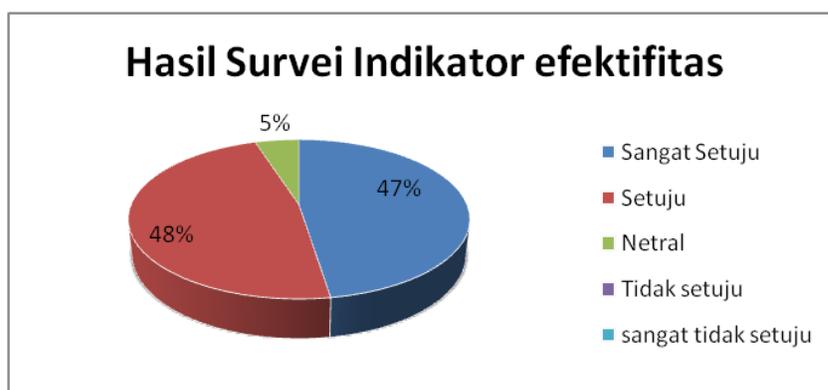
Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan kebijakan "Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM)", yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa untuk memperoleh berbagai keilmuan yang akan membantu mereka masuk ke dunia kerja. Dalam pelaksanaan program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) telah mendapatkan respons positif dari Universitas Negeri Padang. Hal ini dibuktikan dengan antusiasnya mahasiswa yang mengikuti program MBKM tersebut. Berdasarkan data dari pusat MBKM Universitas Negeri Padang tahun 2024 tercatat sebanyak 50 mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial yang mengikuti program MBKM baik dari program pertukaran mahasiswa merdeka (PMM), kampus mengajar (KM), maupun magang dan studi independen bersertifikat (MSIB). Salah satu bentuk

partisipasi dalam program ini yaitu program MBKM juga dilaksanakan di Fakultas Ilmu Sosial. Dalam pelaksanaan program MBKM di Fakultas Ilmu Sosial ini masih perlu adanya peningkatan, sehingga diperlukan suatu penilaian atau evaluasi terhadap pelaksanaan program MBKM di Fakultas Ilmu Sosial untuk melihat seberapa besar dampak pelaksanaan program tersebut terhadap peningkatan keterampilan, *hard skill* dan *soft skill* mahasiswa.

Menurut Dunn dalam (Dewi, 2022) menjelaskan bahwa proses mengumpulkan data tentang nilai atau keuntungan dari tindakan kebijakan disebutnya sebagai evaluasi. Dalam hal ini, program atau kebijakan dianggap mencapai tingkat kinerja, yang menunjukkan bahwa masalah kebijakan telah diselesaikan. Dalam melakukan penilaian atau evaluasi program MBKM di Fakultas Ilmu Sosial terdapat beberapa indikator dalam penilaian. Hal ini sejalan dengan pendapat William N. Dunn dalam (Muhammad Firyal & Widya Kurniati, 2018) menjelaskan bahwa terdapat beberapa indikator atau kriteria dalam melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan, seperti efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

1. Efektifitas

Efektifitas adalah suatu bentuk kriteria mengenai pencapaian hasil yang dicapai. Dalam hal ini efektifitas dijadikan sebagai indikator untuk mencapai tujuan pelaksanaan program kebijakan MBKM di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Adapun cakupan dari indikator efektifitas ini terdiri dari lima sub indikator yang menjadi tolak ukur dalam penilaian indikator efektifitas ini, seperti meningkatkan kompetensi mahasiswa, pengalaman yang didapatkan relevan dengan bidang studi mahasiswa, pengembangan *soft skill*, pengaplikasian teori, dan berpikir kritis dan analitis.

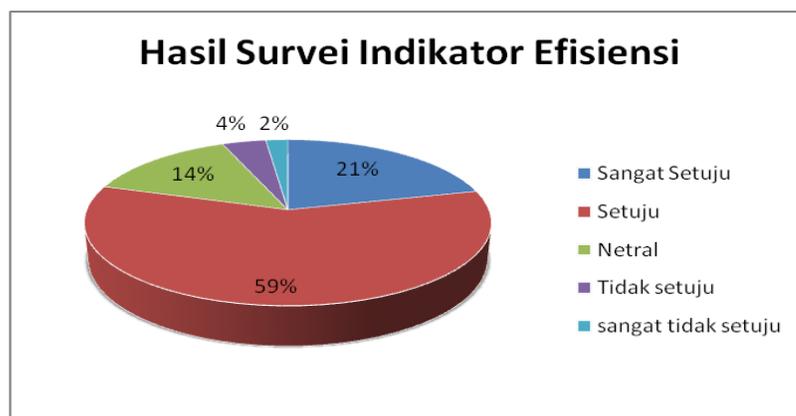


Berdasarkan hasil survei yang dilakukan dengan mahasiswa di atas, menunjukkan bahwa adanya respon yang sangat positif dari mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang terhadap efektifitas dalam pelaksanaan kebijakan MBKM tersebut. Pada diagram tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 48% mahasiswa

menyatakan setuju dan 47% menyatakan sangat setuju dengan efektifitas program ini. Dan hanya 5% responden yang bersikap netral terhadap efektifitas pelaksanaan program MBKM tersebut. Meski pun masih terdapat sekitar 5% responden yang netral menunjukkan masih adanya hal yang harus ditingkatkan lebih lanjut sehingga lebih optimal lagi.

2. Efisiensi

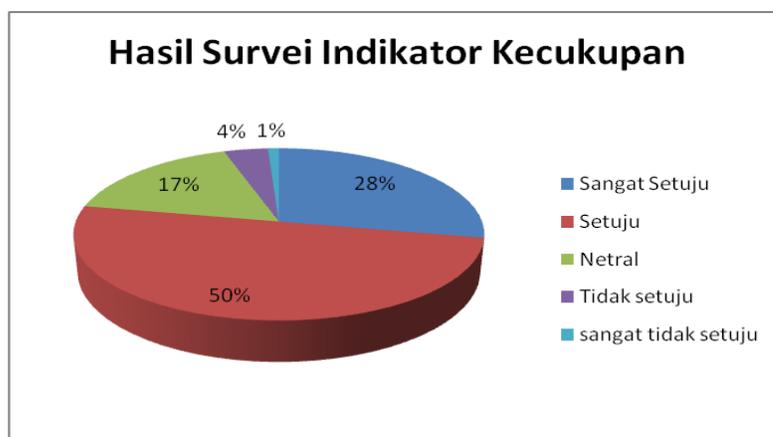
Efisiensi merupakan salah satu bentuk indikator di dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program MBKM di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Dalam efisiensi ini mengukur sejauh mana pelaksanaan program MBKM tersebut dalam memberikan manfaat yang optimal bagi mahasiswa yang mengikuti program tersebut. Di dalam indikator efisiensi ini terdapat beberapa sub indikator yang menjadi tolak ukur dalam penilaian efisiensi terhadap pelaksanaan program MBKM, seperti proses administrasi program MBKM mudah diikuti, waktu pelaksanaan yang sesuai dengan beban akademik, pemanfaatan sumber daya fakultas yang optimal, konversi nilai adil dan efisien, serta alokasi sumber daya finansial yang efisien dan tepat.



Berdasarkan hasil survei di atas, menunjukkan bahwa dalam indikator efisiensi pelaksanaan kebijakan MBKM di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang menunjukkan respon yang cukup positif dari mahasiswa. Sebanyak 59% mahasiswa menyatakan setuju dan 21% responden yang menyatakan sangat setuju dengan kebijakan MBKM yang telah diimplementasikan secara efisien. Namun, terdapat 14% responden yang bersikap netral, yang mana hal ini menunjukkan bahwa adanya sejumlah individu yang belum sepenuhnya yakin dan masih memerlukan lebih banyak informasi untuk menilai efisiensi program tersebut. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan yaitu adanya 4% responden yang tidak setuju dan 2% responden yang menyatakan sangat tidak setuju dengan efisiensi pelaksanaan MBKM di Fakultas Ilmu Sosial ini. Meski pun persentasenya kecil, namun hal ini menunjukkan bahwa masih perlu adanya perbaikan dalam aspek efisiensi kebijakan MBKM tersebut.

3. Kecukupan

Kecukupan merupakan salah satu indikator untuk mengukur proses evaluasi pelaksanaan program MBKM di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Di sini, kecukupan merupakan tolak ukur sejauh mana hasil yang diinginkan telah tercapai. Dalam hal ini, hasil yang diharapkan adalah kesesuaian pelaksanaan program MBKM dengan jenis program MBKM yang memenuhi kebutuhan mahasiswa, pengalaman yang cukup, dukungan finansial dan non finansial yang memadai, materi dan kurikulum yang cukup komprehensif, dan bimbingan akademik yang cukup saat mengikuti program MBKM.

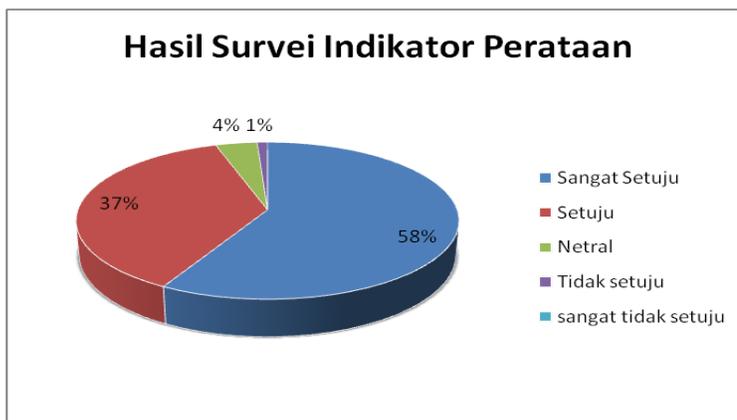


Berdasarkan hasil survei di atas, menunjukkan bahwa dalam indikator kecukupan pelaksanaan program MBKM di Fakultas Ilmu Sosial terlihat mayoritas mahasiswa sebagai responden memberikan tanggapan positif. Sebanyak 50% mahasiswa menyatakan setuju dan 28% sangat setuju dengan kecukupan dalam pelaksanaan program tersebut. Namun, terdapat sekitar 17% mahasiswa bersikap netral, yang mana hal ini mengindikasikan bahwa responden tersebut belum memiliki pendapat yang kuat terkait indikator kecukupan dari pelaksanaan program MBKM ini. Kemudian, sebagian kecil mahasiswa memberikan tanggapan negative dengan 4% menyatakan tidak setuju dan 1% sangat tidak setuju dengan kecukupan dari pelaksanaan program tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program MBKM di Fakultas Ilmu Sosial dinilai cukup memadai, namun masih perlunya perbaikan terkait kecukupan dari pelaksanaan program tersebut.

4. Perataan

Indikator perataan ini menunjukkan bagaimana suatu kebijakan yang dibuat dan diterapkan dapat tersalurkan pelayanannya atas dasar kesamaan manfaat yang diperoleh dari kebijakan tersebut. Pada pelaksanaan kebijakan MBKM di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, pihak MBKM melalui fakultas harus mampu memberikan bantuan kepada mahasiswa tanpa adanya diskriminasi sehingga proses kegiatan program

MBKM di Fakultas Ilmu Sosial menjadi salah satu kebijakan kementerian pendidikan dan kebudayaan yang dapat mencerdaskan kehidupan bangsa terutama bagi mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial. Adapun yang menjadi tolak ukur dalam mengidentifikasi pemerataan dalam pelaksanaan program MBKM terhadap mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial yaitu adanya kesempatan yang sama, informasi yang merata, tidak adanya diskriminasi, memberikan manfaat dan akses yang setara kepada semua mahasiswa.

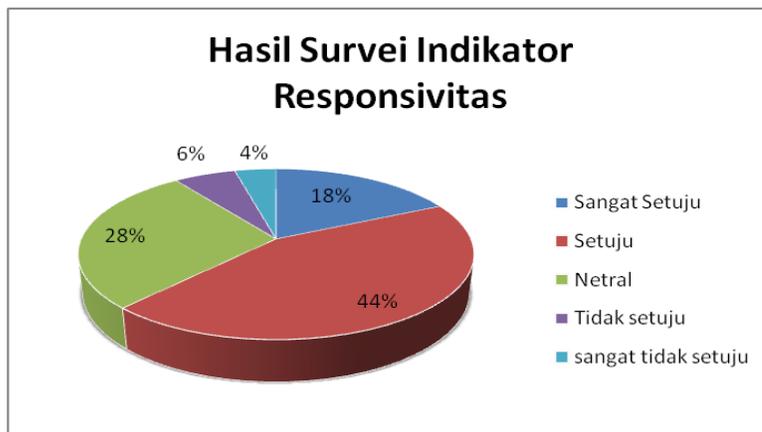


Berdasarkan hasil survei dari indikator pemerataan di atas menunjukkan bahwa tingkat penerimaan yang sangat tinggi di kalangan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial. Mayoritas 58% mahasiswa menyatakan sangat setuju terhadap pelaksanaan kebijakan MBKM yang merata kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial, selanjutnya terdapat 37% lainnya menyatakan setuju. Hanya sebagian kecil mahasiswa yaitu 4% bersikap netral dan 1% menyatakan tidak setuju terhadap pemerataan pelaksanaan kebijakan MBKM ini. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlu adanya evaluasi terhadap pemerataan kebijakan tersebut terutama dalam pemberian informasi dan sosialisasi terkait pelaksanaan kebijakan MBKM ini.

5. Responsivitas

Responsivitas mengacu pada sejauh mana suatu kebijakan responsif terhadap kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Dalam konteks pelaksanaan kebijakan MBKM di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, responsivitas mengacu pada kemampuan kebijakan tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi mahasiswa. Proses pelaksanaan kebijakan MBKM ini diharapkan mampu menjadi respon pihak fakultas dan universitas untuk memastikan program yang ada dapat dimaksimalkan, memberikan hasil yang positif, memberikan kemudahan, dan tanggap terhadap kebutuhan yang diinginkan oleh mahasiswa. Dalam indikator responsivitas ini meliputi beberapa hal yang harus dipenuhi oleh pihak program MBKM di Fakultas Ilmu Sosial untuk mencapai hasil yang responsif terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut, yaitu cepat dalam menanggapi keluhan mahasiswa, rutin memberikan umpan balik kepada

mahasiswa, responsiv terhadap saran perbaikan, tanggap dalam mengatasi kendala, dan responsiv dosen pembimbing dalam berdiskusi dengan mahasiswa terkait program MBKM ini.

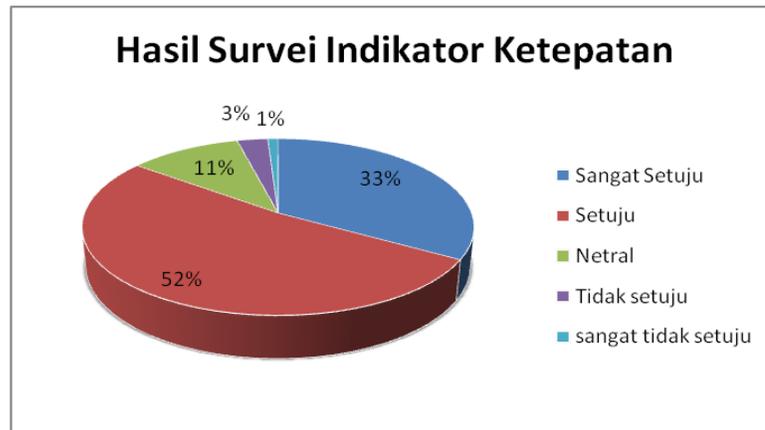


Berdasarkan hasil survei di atas, menunjukkan respon yang beragam dari para mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial terkait responsivitas pelaksanaan kebijakan MBKM ini. Mayoritas mahasiswa yaitu 44% menyatakan setuju dengan responsivitas pelaksanaan kebijakan ini, kemudian sebanyak 18% lainnya menyatakan sangat setuju. Namun, terdapat cukup banyak mahasiswa yang bersikap netral yakni 28%, yang mana hal ini menunjukkan bahwa mungkin diperlukannya informasi lebih lanjut ataupun belum bisa membentuk opini yang tegas terkait responsivitas pelaksanaan kebijakan MBKM di Fakultas Ilmu Sosial ini. Di sisi lain, masih terdapat 6% mahasiswa yang menyatakan tidak setuju dan 4% sangat tidak setuju dengan responsivitas pelaksanaan kebijakan MBKM ini, yang mana hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya ruang untuk perbaikan dalam segi aspek responsivitas kebijakan MBKM ini.

6. Ketepatan

Ketepatan mengacu pada nilai dari tujuan program kebijakan dan kekuatan asumsi yang mendasari tujuan kebijakan tersebut. Dalam konteks pelaksanaan kebijakan MBKM di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang ini, ketepatan mengacu pada sejauh mana kebijakan ini selaras dengan tujuan pendidikan tinggi dan kebutuhan mahasiswa. Mengacu pada pedoman pelaksanaannya, perlu diperhatikan apakah program ini tepat sasaran dan bermanfaat bagi mahasiswa, apakah program ini dapat memberikan dampak positif terhadap pengalaman belajar dan kemampuan mahasiswa, dan apakah program ini dapat memberikan dampak positif terhadap pengembangan akademik dan profesional mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang secara keseluruhan. Dalam menilai tingkat ketepatan pelaksanaan kebijakan MBKM di Fakultas Ilmu Sosial dalam memberikan manfaat bagi mahasiswa, dapat dilihat dari keterampilan, minat dan bakat

mahasiswa yang tepat dan relevan, serta metode pembelajaran yang digunakan tepat dalam pemecahan masalah (*problem solving*) baik di lingkungan kampus maupun di lingkungan kehidupan sehari-hari.



Berdasarkan hasil survei indikator ketepatan pelaksanaan kebijakan MBKM di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang menunjukkan bahwa adanya tingkat respon yang sangat positif dari mahasiswa. Sebanyak 52% mahasiswa menyatakan setuju dengan ketepatan pelaksanaan kebijakan tersebut. Kemudian, 33% mahasiswa menyatakan sangat setuju. Sementara itu, terdapat 11% mahasiswa bersikap netral, yang mana hal ini menunjukkan bahwa sebagian kecil mahasiswa mungkin masih memerlukan informasi lebih lanjut atau belum bisa membentuk opini yang tegas terkait ketepatan pelaksanaan kebijakan MBKM ini. Di sisi lain, hanya 3% mahasiswa yang menyatakan tidak setuju dan 1% sangat tidak setuju. Hal ini menandakan adanya tingkat ketidakpuasan dari sebagian kecil mahasiswa yang mengikuti kebijakan MBKM tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukannya perbaikan dan evaluasi terutama dalam penyamaan metode dan program pembelajaran, sehingga program yang ditawarkan dalam pelaksanaan MBKM di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang tepat sasaran dalam mencapai tujuannya.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan penelitian di atas mengenai Evaluasi Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, dalam artikel ini penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang secara umum telah dilaksanakan dengan baik, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu adanya perbaikan atau evaluasi mengenai pelaksanaan kebijakan MBKM tersebut. Hal tersebut berdasarkan temuan lapangan, masih adanya mahasiswa yang mengalami keluhan dan kendala mengenai sistem pengkonversian nilai yang kurang jelas. Belum cukup tepat dan efisiennya dalam

pencairan bantuan finansial atau dana yang diterima oleh mahasiswa saat mengikuti program kebijakan MBKM ini yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak MBKM fakultas maupun universitas mengenai pelaksanaan kebijakan MBKM ini, karena sosialisasi yang dilakukan hanya pada awal pembukaan program kebijakan MBKM saja dan tidak dilakukan secara berkelanjutan atau berkala sehingga kurangnya pemahaman mahasiswa mengenai pelaksanaan kebijakan MBKM tersebut.

Daftar Pustaka

- Anggita, M. Y., & Wahyudin, M. A. (2021, December). Realisasi dan Evaluasi Program “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka” pada Program Studi Sarjana Fisioterapi Universitas Esa Unggul. In *Jurnal Forum Ilmiah* (Vol. 18, No. 04).
- Asril, C. M., Amiruddin, A., & Lamada, M. S. (2023). Evaluasi program merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) menggunakan model CIPP (context, input, process, product). *Jurnal Media TIK*, 6(1).
- Dewi, D. S. K. (2022). Buku Ajar Kebijakan Publik Proses, Implementasi dan Evaluasi.
- Meke, K. D. P., Astro, R. B., & Daud, M. H. (2022). Dampak Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 675-685.
- Muhammad Firyal & Widya Kurniati (2018). Studi Evaluasi Kebijakan. Ideal Publishing.
- Mulyana, M., Wahyudin, Y., Lesmana, D., Muarif, M., & Mumpuni, F. S. (2022). Evaluasi Dampak Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada Bidang Studi Akuakultur. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 1551-1564.
- Rofiqoh, I., & Zulhawati, Z. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran.
- Saparudin & Arizona. (2022). Metode Penelitian Campuran: Alternatif Menjawab Permasalahan yang Komprehensif.
- Wijihastuti, R. S., Perdana, A. T., Pambudi, A., Alamsyah, F., Puspitasari, R. L., Effendi, Y., ... & Dianita, A. C. (2022). Evaluasi program merdeka belajar kampus merdeka mandiri prodi biologi Universitas Al Azhar Indonesia: studi kasus respon mahasiswa. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 3(2), 77-81.

-
- Wulandari, D., Febry, N., Hartatmaja, A. K. J., Mangula, I. S., & Sabrina, O. A. (2022). Evaluasi implementasi program merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) di tingkat program studi: Studi di Universitas Paramadina. *INQUIRY: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 13(01).
- Adawiyah, P. S., Purba, A. M., & Sitepu, H. (2023). Strategi Menciptakan Motivasi Siswa/i di SMP Negeri 40 Medan Melalui Program MBKM. *Pengabdian Pendidikan* <https://jurnal.itscience.org/index.php/ppi/article/view/3020>
- Agus, A. A., & Asiah, N. (2021). Implementasi kebijakan merdeka belajar–kampus merdeka (Studi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar). *Jurnal Kreatif Online*. <https://jurnalfkipuntad.com/index.php/jko/article/view/1237>
- Baharuddin, M. R. (2021). Adaptasi kurikulum merdeka belajar kampus merdeka (Fokus: model MBKM program studi). *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*. <http://www.ejournal.my.id/jsgp/article/view/591>
- Dewanta, F. (2022). Kajian Persepsi Mahasiswa Terkait Penerapan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Fakultas Teknik Elektro Universitas Telkom. *Jurnal Penelitian Pendidikan*. <https://ejournal.upi.edu/index.php/JER/article/view/47110>
- Fauziah, D. A., & Kuntari, S. (2023). Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM): Pemerataan Mutu Sumber Daya Manusia Pada Pendidikan Tinggi Melalui Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka. *Innovative: Journal Of Social Science* <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/478>
- Khaira, I. L. (2023). PROGRAM MBKM MAGANG DI PT. HIDEAKI KIMIKA INDONESIA. *Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat* <http://ejournal.warunayama.org/index.php/krepa/article/view/162>
- Nirmayanthi, A., Naro, W., & Br, A. N. (2024). ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kearifan* <https://jipkl.com/index.php/JIPKL/article/view/135>
- Nurkholiq, A. (2022). ADAPTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) BERBASIS KKNI:(Model MBKM Program Studi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam). *Aswaja: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*. <https://guru-aswaja.com/ejurnal/index.php/aswaja/article/view/32>
- Shofia, S., Husnita, L., & Junaidi, J. K. (2023). Partisipasi Mahasiswa dalam Program Kampus Mengajar, Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM). *Jurnal Pendidikan Tambusai*.

<https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/9473>

SUGIARTI, T. (2023). Realisasi, Evaluasi Terhadap Kebijakan Mbkm Di Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Psikologi (JIPP)*. <http://jurnalcendekia.id/index.php/jipp/article/view/215>

Wasih, W., & Tama, M. M. L. (2023). Manfaat Mahasiswa Magang Dalam Program MBKM Kerjasama Antar Universitas Bina Darma Palembang Dengan Pemkab Banyuasin. *Jurnal Pengabdian Kepada* <http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/874>